



Kemendikdasmen

Kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Posel: pengaduan@kemendikdasmen.go.id

Laman: www.kemendikdasmen.go.id

Pusat Panggilan: 177 **Whatsapp:** 081218040427

SIARAN PERS

Nomor: 161/sipers/A6/II/2026

Kemendikdasmen Dukung Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar di Bali

Denpasar, Bali, 25 Februari 2026 — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan dukungannya terhadap penguatan pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi anak terlantar di Provinsi Bali sebagai langkah strategis dalam memastikan akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti saat menghadiri kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Tinggi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali tentang Penanganan Hak Administrasi Kependudukan bagi Anak Terlantar di Provinsi Bali pada Selasa (24/2).

Dalam sambutannya, Mendikdasmen menyampaikan apresiasi atas inisiatif kolaborasi lintas sektor yang dinilai menjadi langkah penting dalam pemenuhan hak dasar anak. Menurutnya, anak-anak dalam kondisi terlantar merupakan korban dari berbagai persoalan sosial sehingga negara perlu memastikan mereka tetap memperoleh hak pendidikan.

"Penandatanganan nota kesepahaman ini sangat penting dalam konteks kita memberikan hak kepada anak Indonesia. Ini yang pertama dan mudah-mudahan nanti bisa kita replikasi atau kita buat yang serupa di tingkat nasional karena masalah seperti ini memang tidak hanya terjadi di Bali," ujarnya.

Menteri Mu'ti juga menjelaskan bahwa anak-anak dalam kondisi rentan tetap harus memperoleh layanan pendidikan melalui pendidikan layanan khusus yang diperkuat melalui jalur pendidikan nonformal. "Mereka ini mendapatkan pendidikan layanan khusus melalui pendidikan nonformal. Karena itu pendidikan nonformal kami perkuat sekarang ini. Bentuk pendidikannya tidak harus di sekolah formal dalam bentuk misalnya *homeschooling* atau program kesetaraan melalui PKBM itu kami buka lebih luas lagi," ujar Mu'ti.

Ia menegaskan komitmen Kemendikdasmen dalam menjamin hak pendidikan seluruh anak Indonesia sekaligus memperkuat dukungan terhadap pemerintah daerah melalui berbagai program pendidikan. "Kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen untuk anak-anak Indonesia, siapapun dia, apapun keadaan ekonominya, siapapun orang tuanya, di manapun mereka berada, kita berkomitmen memberikan layanan pendidikan yang bermutu," ujar Mu'ti.

Selain itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi mengapresiasi kolaborasi lintas sektor dalam upaya perlindungan anak. "Kejaksaan punya empati punya kebedulian



Kemendikdasmen

Kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Posel: pengaduan@kemendikdasmen.go.id

Laman: www.kemendikdasmen.go.id

Pusat Panggilan: 177 **Whatsapp:** 081218040427

SIARAN PERS

yang luar biasa bagaimana menangani anak-anak yang terlantar mudah-mudahan ini bisa menginspirasi daerah-daerah lainnya,” ujar Ariffah.

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Narendra Jatna menegaskan bahwa pemenuhan identitas hukum menjadi fondasi penting dalam perlindungan anak serta akses terhadap berbagai layanan negara. “Dokumen tersebut bukan sekadar administrasi, melainkan pintu masuk bagi anak untuk memperoleh akses pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga perlindungan hukum. Ketika negara memberikan identitas sesungguhnya, negara sedang mengakui dan melindungi masa depan,” ujar Narendra.

Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan komitmen pemerintah daerah yang akan segera menindaklanjuti kerja sama tersebut melalui langkah konkret di seluruh wilayah Bali. “Ini harus menggugah kesadaran kita bersama untuk menangani masalah anak terlantar di Provinsi Bali agar negara ini hadir menyelesaikan anak-anak ini dengan berbagai skema kebijakan yang harus kita jalankan secara bersama-sama,” ujar Wayan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Chatarina Muliana, menambahkan bahwa Nota Kesepahaman ini menjadi langkah sinergis antar instansi dalam memastikan pemenuhan hak dasar anak melalui kepemilikan identitas kependudukan. “Memiliki NIK menjadi sangat penting bagi setiap anak Indonesia. NIK selain penting bagi anak, juga sangat membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam memastikan seluruh program pemerintah dan anggaran yang digunakan dapat tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat manfaat,” ungkapnya.

**Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah**

Laman: kemendikdasmen.go.id

X: x.com/Kemdikdasmen

Instagram: [instagram.com/kemendikdasmen](https://www.instagram.com/kemendikdasmen)

Facebook: [facebook.com/kemendikdasmen](https://www.facebook.com/kemendikdasmen)

YouTube: KEMDIKDSMEN

Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id

Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers

#PendidikanBermutuuntukSemua

#KemendikdasmenRamah

